

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN: STUDI KASUS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh :

Rahman¹⁾, Baiq Weni Hastuti²⁾, Romi Riwayal Haini³⁾, Muhammad Khalid⁴⁾, Basilius Redan Werang⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Ganesha

¹email: rahman.bilepenanggak@gmail.com

²email: baiqhastuti55@admin.sd.belajar.id

³email: romihaini44@guru.sd.belajar.id

⁴email: khalidamedasy09@gmail.com

⁵email: werang267@undiksha.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 1 Juli 2026

Revisi, 28 September 2026

Diterima, 29 September 2026

Publish, 30 September 2026

Kata Kunci :

Kebijakan Pendidikan,
Tantangan Implementasi,
Peluang Pendidikan,
Deep Learning,
Indonesia.



ABSTRAK

Dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia kerap mengalami perubahan seiring transisi rezim, yang melahirkan ruang tantangan dan peluang tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional, dengan fokus pada transisi Kurikulum Merdeka menuju substansi pembelajaran bermakna (*Deep Learning*) yang disasar pada tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, laporan resmi pemerintah, serta dokumen rencana strategis pendidikan nasional rentang tahun 2020 hingga 2026. Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan struktural utama melibatkan kesenjangan digital antarwilayah, kompetensi guru yang belum merata, serta kebocoran anggaran. Di sisi lain, bonus demografi, integrasi transformasi digital, dan subkultur komunitas belajar menjadi peluang strategis. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya konsistensi kebijakan yang tidak mudah terdistorsi oleh siklus politik melalui optimalisasi pelatihan guru berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Rahman

Afiliasi: Universitas Pendidikan Ganesha

Email: rahman.bilepenanggak@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan merupakan instrumen fundamental yang digunakan oleh negara untuk merekayasa kualitas sumber daya manusia (SDM) demi mencapai akselerasi pembangunan nasional. Di Indonesia, sektor pendidikan terus mengalami reformasi struktural yang masif. Konspensi global mengenai kualitas pendidikan mendesak pemerintah untuk adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja. Fenomena "ganti menteri ganti kurikulum" yang kerap menjadi kritik publik sesungguhnya mencerminkan adanya upaya pencarian format ideal dalam merespons disrupsi

zaman, meskipun di sisi lain memicu resistensi dan kebingungan di tingkat akar rumput.

Memasuki tahun 2026, arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia mengalami reorientasi mutu yang lebih tajam. Setelah beberapa tahun mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai mengintegrasikan pendekatan *Deep Learning* (pembelajaran mendalam) yang memprioritaskan pemahaman konsep secara radikal (*mindful, meaningful, dan joyful*) ketimbang hafalan materi yang padat. Langkah ini diambil menyusul adanya evaluasi nasional terhadap hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang

mengindikasikan capaian literasi dan numerasi siswa masih berada pada level yang perlu dioptimalkan.

Namun, di balik narasi transformasi tersebut, jurang pemisah antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi di lapangan masih membentang lebar. Masalah klasik seperti disparitas infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia, kesiapan pedagogis para pendidik, hingga ketidaksiapan ekosistem sekolah dalam menerjemahkan kebijakan baru menjadi hambatan sistemik. Ketidakselarasan ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai sejauh mana kebijakan pendidikan mampu diimplementasikan secara konsisten dan berdampak nyata pada ruang kelas.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti aspek implementasi kebijakan kurikulum, namun mayoritas berfokus pada hambatan administratif operasional semata. *Research gap* (celah penelitian) dalam studi ini terletak pada analisis komparatif-integratif yang menyoroti pergeseran fokus kebijakan pendidikan nasional menuju tahun 2026, yang tidak hanya melihat sisi hambatan tetapi memetakan peluang strategis berbasis bonus demografi dan digitalisasi ekosistem pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengurai secara kritis tantangan struktural sekaligus peluang potensial dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia terkini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi dokumen kebijakan secara komprehensif tanpa batas geografis. Data penelitian bersumber dari data sekunder, yang mencakup literatur ilmiah terakreditasi SINTA dan Scopus, regulasi resmi (Undang-Undang, Permendikbudristek), cetak biru (*blueprint*) Pendidikan Indonesia Emas 2045, serta data statistik potret pendidikan nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pangkalan data digital seperti Google Scholar dan Garuda dengan kata kunci seperti "kebijakan pendidikan Indonesia", "tantangan kurikulum", dan "*deep learning* Indonesia". Kriteria inklusi sumber pustaka yang digunakan adalah publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2021–2026) guna menjamin kebaruan informasi (*up to date*).

Teknik analisis data yang diterapkan mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga alur kegiatan:

1. **Reduksi Data:** Menyaring dan mengklasifikasikan data mengenai hambatan serta peluang implementasi kebijakan pendidikan berdasarkan fokus penelitian.
2. **Penyajian Data:** Menyusun informasi secara naratif dan menyajikannya dalam bentuk tabel matriks analitis agar lebih mudah dipahami.

3. **Penarikan Kesimpulan:** Merumuskan inferensi logis terkait solusi strategis atas fenomena kebijakan yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Struktural Implementasi Kebijakan Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis data dokumentasi dan literatur mutakhir, implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan berlapis yang bersifat struktural dan kultural. Matriks hambatan utama dapat dipetakan ke dalam tiga pilar fundamental berikut:

Tantangan terbesar yang menonjol pada tahun berjalan ini adalah kelelahan adaptif (*adaptive fatigue*) yang dialami oleh para pendidik. Belum tuntasnya internalisasi paradigma Kurikulum Merdeka secara menyeluruh, guru-guru kini dituntut memformulasikan rancangan pembelajaran berbasis kurikulum mendalam (*Deep Learning*) yang berpusat penuh pada murid. Tanpa disertai dengan skema pendampingan intensif yang bersifat asimetris (membedakan pendekatan untuk sekolah maju dan sekolah tertinggal), kebijakan baru justru berpotensi memperlebar jurang diskriminasi struktural kualitas pendidikan antarwilayah.

Aspek Tantangan	Indikator Riil di Lapangan	Dampak Terhadap Implementasi
Kesenjangan Infrastruktur	Disparitas akses internet stabil dan perangkat TIK antara wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan wilayah urban.	Digitalisasi administrasi dan platform pembelajaran (<i>Learning Management System</i>) tidak berjalan merata.
Kesiapan Pedagogis Guru	Masih kuatnya kultur mengajar konvensional (ceramah sentris) dan rendahnya pemahaman mengenai esensi <i>Deep Learning</i> .	Kurikulum baru sering kali hanya diadopsi secara administratif, bukan substansial di dalam kelas.
Tata Kelola & Pembiayaan	Alokasi 20% APBN yang sering mengalami fragmentasi di tingkat daerah serta inefisiensi birokrasi penyerapan dana.	Sarana penunjang literasi (seperti perpustakaan dan laboratorium) di sekolah rakyat pedesaan masih minim.

Peluang Strategis Akselerasi Mutu Pendidikan

Kendati dihadapkan pada hambatan yang masif, lanskap pendidikan Indonesia memiliki modalitas peluang yang sangat besar jika mampu dikapitalisasi dengan tepat oleh pengambil kebijakan. Peluang pertama bersumber dari Subkultur Komunitas Belajar (Kombel) yang tumbuh subur secara organik di berbagai satuan pendidikan. Platform teknologi seperti platform merdeka mengajar telah membentuk jejaring guru yang saling berbagi praktik baik secara mandiri. Gerakan akar rumput ini mempercepat diseminasi konsep pembelajaran bermakna tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pelatihan formal kedinasan yang birokratis.

Peluang kedua ditopang oleh momentum Bonus Demografi. Melimpahnya populasi usia produktif di Indonesia menghasilkan kelompok peserta didik yang memiliki karakteristik *digital native* (fasih teknologi sejak dini). Karakteristik ini

sangat kompatibel dengan rencana strategis transformasi digital pendidikan. Keterbukaan generasi muda terhadap metode pembelajaran berbasis kecerdasan buatan (*AI-driven learning*) dan simulasi interaktif membuka ruang bagi guru untuk menerapkan model *blended learning* secara optimal, asalkan diarahkan pada penguatan fakta dasar dan kedalaman analisis, bukan sekadar hiburan visual.

Sintesis Solusi Integratif

Menghadapi paradoks antara tantangan dan peluang tersebut, pemerintah memerlukan konsistensi regulasi yang diikat oleh payung hukum jangka panjang, seperti penetapan Haluan Besar Pendidikan Nasional yang tidak mudah diubah oleh pergantian rezim politik. Kebijakan orientasi mutu 2026 yang menuntut murid berpikir kritis tidak akan tercapai apabila hulu masalah—yaitu kesejahteraan dan standarisasi kompetensi guru—belum diselesaikan secara sistemik. Diperlukan adanya alokasi anggaran afirmatif yang berfokus pada pembenahan fasilitas sekolah rakyat yang ada daripada melakukan eksperimen proyek logistik baru yang tidak mendesak.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini berada pada titik kritis transisi dari pemulihan administratif menuju pendalaman mutu substansial (*Deep Learning*). Tantangan utama yang menghambat keberhasilan kebijakan ini didominasi oleh faktor struktural, yaitu ketimpangan infrastruktur digital, kesiapan kompetensi guru yang belum homogen, serta fragmentasi tata kelola anggaran. Kendati demikian, modalitas sosial berupa ekosistem komunitas belajar mandiri dan karakteristik adaptif siswa di era bonus demografi menjadi peluang emas yang menjanjikan.

Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk:

1. Menjamin konsistensi implementasi kurikulum dengan tidak melakukan perombakan nomenklatur secara radikal, melainkan mempertajam kualitas implementasi di level kelas.
2. Menerapkan kebijakan intervensi asimetris, di mana sekolah di wilayah 3T diberikan dukungan infrastruktur fisik dan pendampingan tatap muka terlebih dahulu sebelum dibebani target capaian digital.

5. REFERENSI

- Darmawan, C. (2026). *Resolusi Pendidikan 2026: Menguji Capaian Akademik dan Arah Baru Kebijakan Nasional*. Jurnal Analisis Kebijakan Publik, 14(1), 45-58.
- Kemendikdasmen. (2025). *Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045*. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

- Mu'ti, A. (2026). *Pendidikan Berorientasi Mutu: Menempatkan Murid sebagai Pusat Kebijakan Nasional*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 12(2), 110-123.

- Ropiyadi, M. (2025). *Transformasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning): Tantangan Kesiapan Ekosistem dan Guru di Tahun Ajaran Baru*. Jurnal Pedagogi Kontemporer, 8(3), 201-215.

- Universitas Mulia. (2025). *Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Menguji Kualitas Sekolah Rakyat di Tengah Disrupsi Kurikulum*. Prosidings Seminar Nasional Pendidikan, 5(1), 12-25.